Jurnal ADMINISTRATIVUS
JURNAL KAJIAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Kinerja Perangkat Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabuapaten Minahasa

Jurnal Administrativus Vol 3 No 2, E-ISSN 3026-3018
© Tahun IAN FISH UNIMA. All right reserved ISSN
Syaloom Kindangen, Fitri Mamonto, Devie Siwij
[123]Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado
syaloomkindangen@gmail.com, fitrimamonto@unima.ac.id,deviesiwij@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

Key word:
Village Apparatus Performance, Public Services
Accepted:15 Maret 2025
Revised : 1 April 2025
Published: 30 April 2025

ABSTRACT

This study aims to determine the Performance of the Kembes Satu Village Apparatus, Tombulu District, Minahasa Regency. The method used in this study is a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. This study focuses on Public Services, Transparency and Accountability, Administrative Performance, Innovation and Development. The results of the study show (1) Transparency and Accountability: The community lacks information about village financial reports. (2) Administrative Performance: There are still obstacles experienced by the community in proposing the making of land certificates and the lack of discipline of village officials. (3) Innovation in Development: Lack of information from the government to the community regarding village infrastructure development.

INTISARI

Kata kunci:
Kinerja Perangkat Desa, Pelayanan Publik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Perangkat Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada Pelayanan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas, Kinerja Administratif, Inovasi dan Pembangunan. Dengan hasil penelitian menunjukan (1) Transparansi dan Akuntabilitas: Masyarakat kurang mendapatkan informasi tentang laporan keuangan desa. (2) Kinerja Administratif: Masih ada kendala yang di alami masyarakat dalam pengusulan pembuatan sertifikat tanah dan kurang disiplinnya perangkat desa. (3) Inovasi dalam Pembangunan: Kurangnya informasi dari pemerintah kepada masyarakat terkait pembangunan infrastruktur desa.

I. Pendahuluan

Di Indonesia, desa merupakan salah satu bentuk implementasi pemerintahan pusat untuk mengoptimalkan pelayanan kepada birokrasi, sehingga desa dapat secara mandiri mengelola urusan pemerintahan dalam wilayah administrasi mereka. Dalam hal ini, kewenangan pemerintah desa sangat penting untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan di pedesaan, diperlukan landasan yang kokoh.

Menurut Sujadi "istilah Desa berasal dari bahasa sansekerta, deshi, yang artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah."[1] Desa kini diharapkan menjadi wilayah yang mandiri dan dapat menerapkan demokrasi secara maksimal, terutama setelah berlakunya peraturan pemerintah mengenai otonomi desa dan otonomi daerah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan kondisi yang lebih demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah., "keputusan mengenai desa tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa (Perdes). Hal inilah yang menjadi kewenangan desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa desa meliputi antara lain urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Republik Indonesia tentang Desa. Kewenangan kabupaten/kota, negara bagian atau pusat, dan pengaturannya diserahkan kepada desa, kewenangan Pemerintah".

"Pelayanan publik adalah pemenuhan keinganan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggaraan negara"[2]. "Pelayanan publik mencakup seluruh aspek pelayanan dasar yang diperlukan oleh masyarakat dan harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelayanan publik merupakan sebuah sistem yang dibangun dalam pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat. Pelayanan publik yang baik akan memberikan kepuasan kepada masyarakat atas kualitas layanan yang diberikan." [3].

Pelayanan yang diberikan adalah bagian dari tanggungjawab serta kewajiban penyelaenggara pelayanan, apabila layanan yang diberikan pemerintah dapat memuaskan masyarakat, maka masyarakat akan merasa puas dengan layanan yang diberikan kerena sesuai dengan harapan masyarakat. Pelayanan tersebut harus mengutamakan kualitas tanpa melupakan ketersediaan yang terjangkau, serta menekankan pentingnya mutu pelayanan yang baik. Di zaman reformasi ini, masyarakat menjadi lebih terbuka dalam memberikan kritikan terhadap pemerintah terkait pelayanan publik, baik buruknya pelayanan publik sangat di tentukan pada pelayanan yang diberikan yang menjadi kontrol masyarkat bagi penyelengara, kontrol terhadap pelayanan tidak akan lepas dari kinerja aparatur pemberi layanan.

Dengan semangat kebebasan berpendapat, kritik terhadap kinerja aparatur pemerintah desa sering kali disampaikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sarana kerja dan rendahnya produktivitas aparatur pemerintah desa. Pelayanan yang berkualitas sering kali sulit didapatkan akibat kurangnya pengetahuan dan keterampilan aparat dalam memberikan layanan yang memadai. Meskipun sudah berusaha, para aparatur pemerintah desa masih belum memiliki keterampilan yang cukup untuk mengatasi permasalahan tersebut.

"Kinerja pemerintah sangatlah penting dalam mengelola dan mengawasi semua kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepala desa beserta seluruh perangkat desa yang ada di desa diharapkan dapat melaksanakan tugas pemerintahannya secara efektif dalam konteks desa yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan bagi masyarakat. Kinerja pegawai pemerintahan desa merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana target yang telah ditetapkan (baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun waktu) berhasil dicapai oleh manajemen. Target tersebut telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perangkat desa memiliki peran penting dalam membantu kepala desa menjalankan tugas dan fungsi Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertindak sebagai pengawas sekaligus perwakilan masyarakat, sementara pemerintah desa berfungsi sebagai lembaga eksekutif desa, dan BPD berperan sebagai lembaga legislatif desa".[4]

Pada dasarnya, tujuan pembentukan pemerintahan adalah untuk menjaga dan mengelola suatu sistem. Pemerintah tidak dibentuk untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung setiap individu dalam masyarakat untuk berkembang, meningkatkan kemampuan, dan menciptakan kemajuan bersama. Pelayanan

kepada masyarakat menjadi ukuran utama dalam menilai kinerja pemerintah. Masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah secara langsung melalui kualitas layanan publik yang mereka terima. Kualitas layanan publik sangat penting karena dampaknya dirasakan langsung oleh berbagai lapisan masyarakat. Keberhasilan dalam menyediakan layanan publik yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan meningkatkan citra pemerintah di mata masyarakat.

"Penyelenggaraan pemerintah dikatakan baik jika pelayanan publik yang dilakukan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasan kepada masyarakat, karena masyarakat secara langsung menilai terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Indikator kepuasan masyarakat itulah yang menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan"[5]

Berikut laporan kinerja perangkat desa Kembes I selama satu bulan pertama kinerja di tahun 2024

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
1	Fooging DBD	Jumlah kasus DBD	<=5	100%
2	Pelaksanaan dana desa	Pembuatan jembatan menuju puskesmas	1 unit	Di proses
3	RAB air	Jadwal perbaikan air bersih	100%	100%
4	Mengadakan penagihan iuran ari	Jumlah warga terdaftar	>=90%	95%
5	Penyuluhan	Jumlah peserta penyuluhan	>25%	20
6	Kerja bakti perangkat desa	Tingkat partisipasi	>80%	85%

Sumber kantor desa kembes satu kecamatan tombulu, kabupaten minahasa

Berikut dapat kita lihat dari data kinerja perangkat Desa Kembes I, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa. Kinerja perangkat desa ini mencakup berbagai aspek, seperti pelaksanaan program pembangunan desa, penyuluhan kesehatan kepada warga, serta pelaksanaan kerja bakti oleh perangkat desa. Selain itu, perangkat desa juga berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan desa serta menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Dengan peningkatan kinerja yang baik, diharapkan perangkat desa mampu meningkatkan kesejahteraan warga. Namun dari laporan kinerja perangkat desa juga kurang memperhitungkan aspek partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan.

Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program-program yang dilaksanakan oleh perangkat desa sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap pembangunan lokal, dan kurangnya integrasi antara berbagai sektor atau program pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat desa. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya tumpang tindih antara program-program yang dilaksanakan, dan kurangnya sinergi dan koordinasi antar program yang dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Penting bagi perangkat desa untuk meningkatkan kualitas laporan kinerja mereka dengan memperluas cakupan evaluasi kinerja, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat, serta meningkatkan koordinasi antar program-program pembangunan. Hal ini akan membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat desa, serta memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

"Kinerja dalam organisasi mencerminkan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak. Kinerja pegawai memegang peranan penting dalam kemajuan suatu organisasi atau perusahaan. Semakin tinggi kinerja pegawai, semakin mudah bagi organisasi untuk mencapai tujuannya".[6]

II. Metode Penelitian

"Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bersifat deskriptif dan cenderung berlandaskan teori untuk memastikan bahwa fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan." [7]. Selain itu, landasan teoritis juga membantu menguraikan konteks penelitian. Penelitian kualitatif disebut juga penelitian interpreatif, penelitian naturalistic, atau penelitian fenomenelogis, pedekatan kualitatif focus pada makna, kesimpulan, dan definisi situati serta mengkaji lebih banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, pendekatan kualitatifif juga berfokus pada proses daripada hasil akhir.

Penelitian ini berfokus pada; Transparansi dan Akuntabilitas, Kinerja Administratif, dan Inovasi Pembangunan. Penelitian ini dilakukan di desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. Sumber data dari penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yaitu; Data primer yang bersumber dari hasil pengamatan (Observasi),wawancara (Interview), dan dokumentasi dengan peragkat Desa Kembes I. Data sekunder berupa data yang diperoleh dari laporan-laporan dan informasi dalam bentuk dokumentasi yang bersumber dari Desa Kembes I yang diteliti dan juga jurnal atau informasi lain yang terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, berikutnya Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.'

III. Hasil dan Pembahasan

"Pelaksanaan pelayanan dapat diukur, sehingga standar yang baik dapat ditetapkan, baik dari segi waktu yang dibutuhkan maupun hasil yang dicapai. Dengan adanya standar, manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pelayanan, sehingga diharapkan hasil akhirnya dapat memuaskan pihak-pihak yang menerima layanan"[8].

1 Transparansi dan Akuntabilitas

Hasil penelitian menunjukkan untuk membangun kepercayaan antara masyarkat dan perangkat desa di perlukan tata kelola yang efisien dan bersih yang artinya melaksanakan kegiatan atau pelaporan secara terbuka dan memberikan informasi yang benar adanya dengan kejujuran namun perangkat desa belum sepenuhnya melaksanakannya sesuai dengan SOP, laporan keuangan desa seharusnya disampaikan enam bulan sekali, tetapi tidak dilaksanakan, dibalik dari itu bendahara desa membuat laporan keuangan desa setiap tiga bulan sekali tetapi tidak diterima oleh masyarakat setempat, selain dari pada itu tidak adanya wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi atau mengemukakan pendapat.

Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pembinaan mengenai SOP perangkat desa dalam hal Transparansi, selain dari pada itu juga pemerintah setempat belum menyediakan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat.

"Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan desa dengan cara yang terbuka, bertanggung jawab, partisipatif, dan terorganisir. Prinsip partisipatif berarti melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, sementara prinsip bertanggung jawab berkaitan dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara hukum segala keputusan yang diambil. Transparansi berarti pengelolaan keuangan desa dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak. Selain itu, keuangan desa harus dilaporkan sesuai dengan sistem akuntansi keuangan pemerintah dan dibukukan dengan cara yang benar. Untuk mencegah penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa, sangat penting agar semua pihak mulai dari pejabat berwenang hingga masyarakat memahami konsep akuntabilitas dan transparansi. Pemahaman ini penting agar tidak ada sikap acuh tak acuh terhadap proses pengelolaan dana desa. Keuangan desa mencakup segala bentuk kekayaan yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, serta segala hak dan kewajiban yang timbul dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, yang dapat dinilai dengan uang"[9].

2 Kinerja Administratif

Hasil penelitian menunjukkan organisasi atau komunitas memberikan pelayanan administrasi yang baik berupa efektifitas dan efisiennyanya kerja serta koordiasi yang baik antra perangkat desa dan masyarakat, tetapi juga diperlukan kedisiplinan dan kerja sama yang baik. Peragkat desa Kembes Satu telah menerapkan hal-hal tersebut berupa kelancaran bagi masyarakat dalam menyiapkan dokumen atau

pengusulan berkas, diikuti dengan perangkat desa setempat yang terus berevaluasi mengenai masalah yang timbul didesa yang artinya perangkat desa terus berupaya memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat, tetapi juga masih ada beberapa kendala yang menghambat kinerja berupa tingkat kedisiplinan yang masih rendah dan kurangnya pemahaman bagi perangkat desa dalam menggunakan fasilitas pendukung berupa komputer atau prtinter.

Dari hasil temuan dapat disimpulkan bahwa perangkat desa efisien dan terus berkomitmen dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab kelancaran bagi masyarakat menunjukkan sikap yang toleran dan bertanggungjawab namun tak lepas dari itu kurangnya monitoring dari pihak-pihak tertentu untuk penggunaan alat pendukung komputer, dan kepala desa juga tidak melakukan pembinaan kepada perangkat desa untuk penggunaan alat-alat pendukung, selanjutnya diperlukan juga teguran atau sanksi sesuai SK bagi yang kurang disiplin.

"Kinerja pegawai merujuk pada hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja pegawai memiliki peran yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kelangsungan organisasi yang dipimpinnya. Untuk menilai kinerja pegawai, sebuah organisasi atau perusahaan dapat menerapkan sistem penilaian. Sistem ini digunakan untuk mengevaluasi bagaimana cara kerja setiap pegawai dalam mencapai target yang telah disepakati. Jika hasil kerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan, maka kinerja pegawai dianggap baik dan akan diberikan penghargaan. Sebaliknya, jika hasil kerja tidak memenuhi target yang ditetapkan, pegawai akan dikenai hukuman."[10].

3 Inovasi dan Pembangunan

Demi meningkatkan desa menjadi lebih baik dibutuhkannya pembangunan berkelanjutan dan inovasi-inovasi yang mengikuti tren dan teknologi penelitian ini berkomitmen mewujudkan gagasan atau ide yang matang dalam menciptakan inovasi baru di desa, perangkat desa Kembes Satu terus mengembangkan pembangunan-pembangunan berupa jembatan, jalan dan saluran air, tetapi juga perangkat desa belum memiliki ide-ide kreatif bagi desa dan untuk pemberdayaan masyarakat.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan perangkat desa terus menciptakan kemajuan bagi desa dengan adanya pembangunan, namun belum tercetusnya ide-ide kreatif untuk menunjang pemberdayaan bagi masyarakat, diperlukannya sosialisasi atau pembinaan baik kepada perangkat desa ataupun kepada masyarakat demi menunjang pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan minat bagi masyarakat untuk mewujudkan sumber daya manusia.

"Inovasi tidak hanya berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkelanjutan, tetapi juga meningkatkan kemampuan suatu negara untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien dan mengatasi berbagai tantangan global.."[11]

IV.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kinerja Perangkat Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1 Transparansi dan Akuntabilitas

Kinerja perangkat desa belum optimal dijalankan di lihat dari indikator Transparansi dan Akuntabilitas, perangkat desa kurang terbuka kepada masyarakat mengenai laporan keuangan desa, perangkat desa hanya menjalankan tanggung jawab dengan membuat laporan keuangan tetapi tidak mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, juga dari pada itu pemerintah desa tidak membuat forum khusus atau wadah untuk menerima kritikan atau masukan dari masyarakat.

2 Kinerja Administratif

Dilihat dari indikator Kinerja Administratif, kelancaran bagi masyarakat desa dalam pengurusan administrasi atau pun pelaporan, tetapi juga kendala tidak disiplinnya perangkat desa yang seringkali dapat memperlambat kinerja administratif, tidak adanya sanksi yang tegas dari pimpinan mengenai kedisiplinan ataupun pembinaan mengenai hal tersebut.

3 Inovasi dan Pembangunan

Tidak ada ide-ide kreatif dari perangkat desa dalam meningkatkan kemajuan desa dilihat dari indikator Inovasi dan Pembangunan perangkat desa tidak menekankan kepada masyarakat menganai ide-ide kreatif ditarik dari indikator Transparansi dan Akuntabilitas, tidak adanay wadah atau forum dalam menyalurkan ide-ide kreatif, tetapi juga pembangunan-pembangunan didesa terus dikembangkan oleh perangkat desa.

Referensi

[1]. Sujadi (2014: 231). *"Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik".*

[2]. Sinambela, Lijan Poltak. 2012. *"Kinerja Pegawai: Teori Penguluran dan Implikasi, Yogyakata Graha Ilmu."*

[3]. Hayat, 2017. "*Manajemen Pelayanan Publik. Depok: PT. RajaGrafindo Persada."*

[4]. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

[5]. Dr. Itje Pangkey, M.Si, Margareth I.R. Rantung, SH,MAP,MH. "*Manajemen Pelayanan Publik."*

[6]. Alvi C.R Lesawengen[1], Fitri H. Mamonto[2], Jeane Mantiri[3,] *Pengaruh Budaya Kerja "Terhadap KinerjaAparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Jurnal Administrativus Vol 2 No 2, E-ISSN 3026-2018"*

[7]. Dr Rukin (2019:06) "*Metodelogi Penelitian Kualitatif".*

[8]. Moenir. 2010 "*Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta: PT Bumi Aksara".*

[9]. Dr. Marthinus Mandagi, M.Si , Dr. Devie S. R. Siwij, SIP, MAP *"Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tondegesan Dua Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa Christofani Kalengkongan"*

[10]. Recky H. E. Sendouw, Jetty Erna Hilda Mokat, Jeane Mantiri, Margareth I. R. Rantung, Julio Benedictus Tumimomor "*MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA*"

[11].Ayler Beniah Ndraha Desa Di Desa Tondegesan Dua Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa Christofani Kalengkongan "*Peran inovasi dalam pembangunan ekonomi dan pendidikan menuju visi Indonesia Maju 2045 Delipiter Lase1 , Eliyunus Waruwu2 , Helmin Parida Zebua3"*

[11] Devie S. R. Siwij 2 Virginia T. Tiranda 3 Goinpeace H. Tumbel 1, "Effectiveness of Next Generation Regional Management Information System Implementation at the Regional Finance and Asset Agency of North Sulawesi Province," *Technium Social Sciences Journal* 49 (2023): 207–13.

[12] Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan Kabupaten Minahasa.

[13] Hirawan, Zaenal, and Dewi Nurasiatin. "Mekanisme Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang." *The World of Financial Administration Journal* 5, no. 1 (2023). https://doi.org/10.37950/wfaj.vi.1660.

[14] Cantika Suryani, Thelma Wawointana, Devie S. R Siwij, Ismi Dini Saefa (2023) *Kepatuhan Masyarakat Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Maesa Unima Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa*

[15] Aswad, Khaerul. "Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di Bapenda Kabupaten Bulukumba." *Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Polotik*, 2020